

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumi, 1992.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Howarth, Preben. *Metrology-in Short 2 Edition*. Jakarta: Puslit KIM-LIPI, 2008.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Citra, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Yahya, Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jurnal

- Almau, A. dan Suheflihusnaini. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian dalam Penggunaan Senjata Api yang Mengakibatkan Peluru Nyasar dalam Menjalankan Tugas". *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 150-156.
- Fertikel, Imelda dkk. "Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Kecurangan Takaran Minyak Goreng Minyakita". *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025): 2-4.
- Hutahaean, Armunanto. dan Erlын Indarti. "Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 28.
- Karles, Hendy dkk. "Implementasi Pengawasan Metrologi Legal dalam Mendukung Daerah Tertib Ukur: Studi Kasus Pengawasan Tahun 2022 di Kabupaten Samosir". *Jurnal Teknik Indonesia* 3, no. 7 (2024): 75.

- Kosasih, Rudy dkk. "Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17 no. 3 (2023): 4.
- Megawati, Wenny dkk. "Aspek Perlindungan Masyarakat sebagai Sarana Keefektifan Sanksi Pidana bagi Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (2022): 326.
- Nikhio, Angel dkk. "Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya". *Indigenous Knowledge* 2, no. 6 (2023): 415-417.
- Nurviana, Vivin. "Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Studi Hukum Pidana* 2 (2022): 3.
- Senduk, Joshua dkk. "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Metrologi Legal Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981". *Jurnal Lex Privatum Fakultas Hukum Unsrat* 14, no. 5 (2025): 2.
- Sesse, Sudirman. "Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional". *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 2 (2013): 173.
- Yusuf, dkk. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pergaulan Masyarakat". *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 1936.

Skripsi dan Tesis

- Aini, Maghfiroh. "Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Demak". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Muhammad, Fachri. "Penegakan Hukum di Bidang Metrologi Legal Melalui Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang di Wilayah Hukum Kota Makassar". Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022.
- Oskar, Adam Reski. "Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Minyak Goreng Curah". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2024.
- Sihombing, Karia Agus. "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dari Kekerasan Penyidik Polri dan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan dalam Proses Penyidikan". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2022.
- Wibowo, Luki Arif. "Peran Penyidik Polri dalam Penyidik Tindak Pidana (Studi Kasus Polrestabes Semarang)". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Zulkarnain. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dalam Hubungannya dengan Keberadaan Gula Pasir Timbang di Mini Market Kota Pontianak". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Website

Ginting, Ari Muliarta. *Problematika MinyaKita*. Badan Keahlian DPR RI, 2025. [*Copy of TEMPLETE SATU PENULIS \(IS Kom XX Bulan XX 2025\)](#).

Humas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. *Sertifikasi Kompetensi Penyidik untuk Mewujudkan Penyidik yang Profesional dan Berintegritas*. Yogyakarta, 2025. [Sertifikasi Kompetensi Penyidik untuk Mewujudkan Penyidik yang Profesional dan Berintegritas](#).

Supriatin. “Awal Mula Terbongkarnya Kasus Kecurangan MinyaKita” Merdeka.com. Diakses pada 10 Februari 2026. [Awal Mula Terbongkarnya Kasus Kecurangan MinyaKita](#).

Syaifulloh, Muhammad. “Penyidikan Perkara Pidana, Bagaimana Tahapannya?” Tempo.co. Diakses pada 10 Februari 2026. [Penyidikan Perkara Pidana, Bagaimana Tahapannya? | tempo.co](#).